

Kepolisian yang Promoter

DALAM konteks penegakan hukum, kasus (pidana) itu ada yang rumit, *njelimet*, dan kompleks. Ada juga yang sederhana dan mudah diurai hingga ditemukan kerangka bahkan detailnya.

Namun, cepat atau lambat penuntasan kasus ternyata bukan tergantung pada rumit atau simpelnya kasus tersebut. Jika ada faktor lain-lain yang mengontaminasi, kasus yang ditangani bisa saja molor atau yang terang bisa menjadi samar-samar.

Dalam kasus polisi tembak polisi di rumah polisi dan ditangani langsung oleh polisi, masyarakat dan warganet disuguhi episode demi episode informasi (resmi kepolisian) yang semula sulit ditebak, karena kaburnya informasi yang disampaikan, dan potongan-potongan logika yang jauh dari lengkap dan detail, sehingga tidak mudah dirangkai menjadi peristiwa yang logis.

Ditambah dengan adanya konfrontasi informasi yang berlanjut pada perlawanan hukum dari pihak keluarga korban tembak, mengenai fakta-fakta yang tidak diungkapkan kepolisian.

Sontak saja hal ini mengundang perhatian besar. Umumnya warganet mulai menduga-duga: di balik keterangan pihak kepolisian ada skenario tertentu dalam kasus tersebut.

Instruksi

Seciranya, Kamis (21/7/-2022) Presiden Jokowi tidak menginstruksikan dengan keras dan tegas untuk meng-



Asep Dudi S

Dosen Prodi Magister Pendidikan Islam,
Prodi PAI & PGPAUD, Wakil Dekan 1
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba

usut tuntas, membuka apa adanya secara transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, apakah kepolisian akan mengalami kemajuan yang cukup berarti sebagaimana tampak pada perkembangan beberapa hari terakhir ini?

Mestinya tanpa adanya perintah presiden pun kepolisian harus mampu mengungkap kasus ini lebih segera, karena sebagaimana disebut oleh mantan Kabareskrim Komjenpol (Purn) Susno Duaji, kasus ini sebenarnya sangat gamblang karena korbannya jelas dan yang dtersangkakan juga jelas. Tinggal mengelaborasi dan mengembangkannya dalam penyelidikan dan penyidikan. Bahkan, kasus ini didukung oleh cukup banyak alat bukti, berupa CCTV dan saksi pula.

Sayangnya karena "faktor lain-lain" di tubuh internal kepolisian yang menangani kasusnya, menjadikan dalam sebulan ini penanganan lambat dan tidak jelas, dan berujung pada Kapolri memutasikan sejumlah perwira dan memerintahkan pemrosesan 25 personel kepolisian yang dinilai tidak profesional.

Penerapan prosedur olah TKP (tempat kejadian perkara), hilangnya/rusaknya CCTV, dan disinformasi kepada publik, konon menjadi indikasi pemicunya.

Faktor lain-lain dalam kasus ini dapat dikonfrontasi dengan moto kepolisian yaitu promoter, yang diluncurkan pada era Kapolri Jenderal HM Tito Karnavian.

Promoter adalah singkatan dari profesional, modern, dan terpercaya, yang menunjukkan iktikad kuat kepolisian melakukan revolusi mental dalam rangka *strive for excellence*.

Profesionalitas (kinerja) kepolisian dicapai melalui peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia melalui kapasitas berupa pendidikan dan pelatihan, serta penguatan pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan terukur keberhasilannya.

Sementara modern yaitu modernisasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi mudah dan cepat akses. Adapun terpercaya yaitu mewujudkan reformasi internal agar tercipta kepolisian yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, sehingga bisa menegakkan hukum yang berkeadilan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam penanganan sejumlah kasus, kepolisian kerap menyebut istilah *scientific crime investigation* (SCI). Ekspektasi masyarakat tentunya adalah dengan menggunakan SCI yang me-

manfaatkan sebanyak mungkin ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, kepolisian akan lebih mudah menyelidiki dan menyidik suatu tindak kriminal.

Adanya CCTV dan proses forensik akan sangat membantu kerja polisi mengungkap kejadian yang sebenarnya, karena *puzzle* peristiwa akan lebih empirik, terstandar, terdeteksi, terukur, terkonstruksi dengan jelas. Namun faktor lain-lain (*human error*) mengaburkan peran SCI yang seharusnya menjadikan kepolisian bekerja profesional dan modern.

Sebuah channel YouTube, selain getol melakukan *update* perkembangan investigasi kasus polisi tembak polisi ini jam per jam, juga melakukan jajak pendapat tentang tingkat kepercayaan warganet terhadap institusi kepolisian.

Hasilnya cukup menyenangkan, di kisaran 90%-an dari 30.000-an warganet menyatakan tidak percaya atas keterangan polisi dalam kasus ini. Demikian juga pendapat warganet terhadap Komnas HAM yang terlibat dalam investigasi. Sebuah tamparan yang harus menjadi bahan introspeksi terus menerus bagi satuan Bhangkara negeri ini.

Akhirnya, belakangan titik terang kasus ini mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Setelah perintah presiden, mungkin juga karena berbagai stresor publik yang tidak menghendaki kepolisian mempertaruhkan marwah institusi, juga setelah pengacara Bharada E menyatakan kliennya bersedia men-

Ole-Ole

pupuk

PUPUK subsidi
menghilang.
- *Bikin susah petani.*

buruh

BURUH tuntutan
cabut UU Cipta Kerja.
- *Tak pro pekerja sih.*

kasus

PRESIDEN: kasus
Brigadir J buka apa
adanya.

- *Mestinya tak perlu
tunggu instruksi.*

Si Kabayan

jadi *justice collaborator*, informasi-informasi baru memperterang posisi *puzzle* peristiwa dan mulai menjawab sebagian pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana.

Semoga tersangka pelaku yang mau menjadi *justice collaborator* ini disebabkan dorongan hati nurani dan suara Tuhan masih bersemayam dalam dirinya, karena inilah yang sejatinya harus terhunjam dalam pada setiap penegak hukum.

Hal itulah yang menjadikan seorang aparat memiliki integritas, nilai, satu padu antara jiwanya, pernyataan dan kinerjanya. Tanpa itu, promoter hanyalah moto. Semoga masyarakat tidak disuguhi antiklimaks.***